

ABSTRAK

Nama : Nina Nurlaila
Judul Skripsi : KEMISKINAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN; TINJAUAN STRUKTURAL KEMISKINAN PADA MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI KAPUAS KOTA PONTIANAK

Kemiskinan salah satu wujud adanya perbedaan kelas-kelas social dalam masyarakat, yang merupakan fenomena sosial yang sering muncul akibat adanya perbedaan distribusi pendapatan dalam masyarakat. perbedaan distribusi pendapatan dalam masyarakat disebabkan karena adanya kompleksitas struktural yang ada masyarakat. penyebab antara kompleksitas struktural dan bahkan penyebab pribadi inilah yang saling terkait satu sama lain membentuk suatu hambatan struktural yang dialami oleh kelompok marjinal di perkotaan. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di pinggiran sungai Kapuas kota Pontianak disebabkan karena hubungan keterbatasan struktural yang sangat kompleks, mulai dari keterbatasan pendidikan, kesempatan kerja yang rendah, akses modal dan produktivitas yang rendah, hingga ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan system ekonomi yang terus menerus berubah. Kondisi ini menjadi deret panjang penderitaan yang dialami masyarakat ketika keterbatasan struktural tanpa disadari menjadi sebuah hambatan yang kompleks bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, serta kondisi ini diperparah dengan adanya pembangunan yang menimbulkan dampak yang secara tidak langsung mempengaruhi upaya peningkatan produktivitas masyarakat.

Kata kunci : Kemiskinan, keterbatasan Struktural, Hambatan Struktural

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat sebesar 9,02 % dan nasional 13,3 %. Persentasi penduduk miskin di Kota Pontianak tercatat tahun 2005 sebesar 6,84%, 2006 sebesar 7,15%, 2007 sebesar 6,77%, sedangkan pada tahun 2008 angka kemiskinan naik menjadi 9,29 %, untuk tahun 2009 berkisar 6,38 % dan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 6,62 % masyarakat miskin yang masih berada di kota Pontianak.

Untuk garis kemiskinan di Kota Pontianak dari 2005 - 2010, tercatat tahun 2005 sebanyak 143.802 jiwa, 2006 sebanyak 158.130 jiwa, 2007 sebanyak 169.342 jiwa, 2008 sebanyak 193.984 jiwa, 2009 sebanyak 218.802 jiwa dan tahun 2010 sebanyak 242.772 jiwa (Badan Pusat Statistik kota Pontianak 2010).

Masih banyaknya persentase dan jumlah jiwa yang masuk dalam kategori masyarakat miskin, menjadi salah satu dilema tersendiri dan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan kota Pontianak. Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai Kapuas merupakan realita kemiskinan yang tampak di kota Pontianak. Terdapat banyak masyarakat yang

mendiami rumah-rumah non permanen yang berjejer di sepanjang kawasan bantaran sungai Kapuas.

Pembangunan di segala aspek, kota Pontianak ternyata masih menyisakan realitas yang sepatutnya menjadi sorotan pemerintah kota. Ruang kota Pontianak sekarang telah banyak didominasi oleh gedung-gedung pengusaha. Komunitas Masyarakat pada bantaran sungai Kapuas dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan terdapat kesenjangan sosial yang mencolok antara komunitas masyarakat bantaran sungai Kapuas dengan masyarakat lain di sekitar kawasan bantaran sungai Kapuas.

Fenomena seperti itu menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat bantaran sungai Kapuas tidak hanya dapat disorot melalui sudut pandang kultural tetapi juga dapat dilihat dari sudut pandang struktural. Menariknya tinjauan struktural dalam pembahasan kemiskinan ini mencoba menjawab faktor-faktor eksternal masyarakat yang menyebabkan masyarakat dibantaran sungai Kapuas mengalami kondisi miskin. Selain itu, melalui pemahaman faktor eksternal, kita dapat mengetahui bagaimana implikasi dari adanya struktur sosial yang sengaja dibentuk dalam masyarakat yang menyebabkan tidak hanya kesenjangan

ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi menyebabkan rawan terjadi konflik-konflik laten (tersembunyi) yang dapat mengancam ketentraman masyarakat Pontianak khususnya. Apakah struktur sosial tersebut dapat berupa perilaku masyarakat itu sendiri atau bahkan mungkin adanya tekanan struktural dari kelas sosial yang lebih tinggi terhadap masyarakat yang mendiami bantaran sungai Kapuas. Bentuk tekanan ini di antaranya dapat berupa kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan dampak yang akan muncul secara berbeda dalam dua kelas sosial yang berbeda, yaitu kelas sosial menengah ke bawah dan kelas sosial menengah ke atas yang ada di Kota Pontianak. Sehingga kemungkinan terhambatnya masyarakat kelas sosial bawah untuk dapat mendongkrang belengku kemiskinannya.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya suatu tinjauan mengenai kemiskinan yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai Kapuas. Melalui tinjauan struktural diharapkan penelitian mengenai masyarakat miskin di kota Pontianak, khususnya pada kawasan bantaran sungai dapat menjelaskan faktor-faktor dalam struktur sosial yang menjadi penyebab kemiskinan pada masyarakat yang ada di bantaran sungai kapuas.

Terdapat beberapa jenis penelitian mengenai penyebab struktural kemiskinan yang pernah dilakukan, diantaranya adalah penelitian mengenai Tekanan Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan Tradisional di Perkotaan yang dilakukan oleh Soedarso pada tahun 2009 di daerah Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya tekanan struktural yang di alami nelayan dimana mereka mempunyai posisi tawar menawar yang rendah karena munculnya nelayan-nelayan modern. Penelitian selanjutnya, penelitian atas pemukiman miskin di Kota madya Ujung Pandang yang dilakukan oleh Drs. Abu Hamid dan kemudian dilanjutkan oleh S. Menno khususnya di kampung Pisang pada tahun 1992, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat bersifat sangat kondisional dan bukan merupakan sub kultur kebudayaan.

Pembatasan penelitian ini difokuskan pada penyebab struktural dalam skala makro yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai di Kelurahan Tambelan Sampit Pontianak Timur. Dengan demikian permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Kondisi struktural seperti apa yang menghambat masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga masyarakat bantaran sungai Kapuas kota Pontianak?, Mengapa program pembangunan masyarakat belum mampu meminimalisir ketimpangan antar kelompok masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat bantaran sungai Kapuas?, serta Mengapa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai terindikasi sebagai kemiskinan struktural?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan kondisi tekanan struktural yang diderita masyarakat, mengetahui keterkaitan antara tekanan struktural dan penyebab kemiskinan masyarakat, serta mengetahui peran pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Pontianak.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan Masyarakat

Menurut Suparlan (1984:52) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai *“suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”*. Salim (1984) menjelaskan bahwa indikator kemiskinan dapat dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan seseorang atau anggota masyarakat dalam suatu lingkungan social tertentu, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari.

“ Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang, keluarga, kelompok ataupun anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana pada umumnya anggota masyarakat lainnya” (Abdulsyani, 2002 : 190). Salim

(1984, dalam Adil, 2012) menyatakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Meskipun ada, jumlahnya sangat sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali Umumnya mereka yang berada di pedesaan menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja dengan musiman, maka kesinambungan kerja kurang sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan, mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak punya ketrampilan (*skill*) atau pendidikan. Selanjutnya, Suryawati (dalam Salim, 1984,) menyebutkan ciri-ciri kelompok miskin adalah Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi dan kesejahteraan sosial lainnya.

2.2 Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural menurut Menno dan Mustamin Alwi (1992: 129) adalah sebagai berikut : “*Merupakan kondisi kemiskinan yang tercipta dan kekal yang disebabkan oleh mereka yang berada dalam struktur sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat, yang dengan sengaja membiarkan dan tidak memberikan kesempatan pada struktur sosial pada lapisan bawah guna memperbaiki taraf hidup mereka*”. Inti dari masalah kemiskinan struktural sebenarnya terletak pada perangkap kemiskinan atau *deprivation trap*. Perangkap kemiskinan secara rinci terdiri dari lima unsur, antara lain kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi kerentanan dan ketidakberdayaan (Robert Chambers dalam Narwoko dkk, 2006 : 180).

Pandangan kaum *developmentalis*, Kemiskinan struktural merupakan bagian eksternal dari si miskin, Ia berkaitan kegagalan sistem politik, institusi pemerintah, struktur elit dan birokrasi kekuasaan, serta berbagai kebijakan yang "pro-rakyat" (*people-oriented development*). Disatu sisi Pemerintah berusaha memerangi kemiskinan (*the poverty alleviation*) karena faktor struktural, kultural dan natural, tetapi kemudian terjebak dalam perangkap kemiskinan itu sendiri (*the poverty traps*). Dalam arti ketika Pemerintah berusaha menjawab pertanyaan kemiskinan ekonomi dan persoalan keterbelakangan sosial, ternyata di dalam jawaban masih banyak menyisakan pertanyaan. Inilah yang dikenal dengan istilah "*antagonistic developmentalism*" (Bahrum, 2011)

2.3 Hambatan Struktural

Menurut Antony Gidden (2010) menyatakan bahwa hambatan struktural merupakan "*hambatan yang berasal dari kontekstualitas aksi, yaitu dari watak alami sifat-sifat struktural actor yang menempati situasi*". Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hambatan yang berasal dari objektifitas sifat-sifat struktural yang tidak mampu diubah oleh pelaku individual dan hal tersebut membatasi kemampuan mereka.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis yang dijabarkan dalam bentuk eksploratif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lokasi Bantaran Sungai Kapuas Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Snowball sampling yaitu penentuan

subyek akan berkembang selama penelitian berlangsung dan Metode Purposiv sampling dengan menetapkan subyek-subyek penelitian sebagai berikut :

- a. Masyarakat bantaran sungai Kapuas di Kelurahan Tambelan sampit
- b. Dinas sosial Kota Pontianak
- c. Kelurahan Tambelan Sampit
- d. Bappeda Kota Pontianak

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulana data yang dilakukan di lokasi (objek penelitian) secara langsung yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Penelitian Pustaka (*library research*) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.

3.4 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Reduksi, yaitu dengan mengelompokan data menjadi kategori-kategori. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disusun dengan cara mengorganisasikannya kedalam kategori dan unit.
- b. Interpretasi, yaitu dengan melakukan sintesa, pemahaman mendalam dan menganalisa data sehingga makna yang ada dalam setiap masalah dan

hasil yang didapat di lapangan.

- c. Verifikasi yaitu membandingkan hasil interpretasi dan melakukan triangulasi terhadap kajian dan juga terhadap teori yang dipilih (Satori, 2010).

4. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Masyarakat bantaran sungai Kapuas

Berdasarkan data penduduk, masyarakat yang tinggal tepatnya di RW 01 / RT. 01 dan RT 02 bantaran sungai Kapuas Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, di dihuni oleh 145 kepala keluarga dengan rata-rata per kepala keluarga memiliki anggota keluarga di atas tiga anggota keluarga. Sehingga bila di totalkan, kawasan RT.01 dan RT.02 kawasan tepat di Bantaran sungai Kapuas kota Pontianak dihuni oleh lebih dari 435 jiwa dalam dua Rukun Tetangga.

Sementara itu, masyarakat kawasan Rt.04/Rw.01 yang berada di pinggiran sungai Kapuas berjumlah 53 Kepala keluarga dengan 189 jiwa. Berdasarkan karaktersitik pendidikan masyarakat, dari 189 jiwa, 54 orang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, 21 orang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 69 orang tamat Sekolah dasar sederajat, 21 orang belum tamat Sekolah dasar (masih pelajar SD), satu orang tamat diploma (D3), dan sisanya sebanyak 23 orang belum bersekolah (balita). Sedangkan masyarakat di lihat dari karakteristik pekerjaan, dari 189 orang, 43 orang diantaranya bermatapencaharian sebagai buruh harian lepas, 11 orang bermatapencaharian karyawan

swasta dan honorer, 5 orang berwiraswasta, serta satu orang sebagai guru. Sementara itu sisanya sebanyak 110 orang tidak atau belum bekerja. Dari 110 orang yang tidak bekerja termasuk ibu rumah tangga, pelajar dan anak-anak.

Sedangkan masyarakat yang tinggal di kawasan Rt.03/Rw.02 bantaran sungai Kapuas berjumlah 25 Kepala

keluarga dengan jumlah 115 jiwa. Dan hampir sebagian besar kepala keluarga bermatapencarian sebagai buruh. Namun ada beberapa orang yang berwiraswasta dan hampir sebagian kecil yang berstatus pegawai negeri sipil. Adapun Karakteristik masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik kehidupan masyarakat RT.01 dan RT.04 / RW.01 Kelurahan Tambelan Sampit

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (jiwa) |
|--------|--|---------------|
| 1 | Buruh harian lepas | 53 |
| 2 | Buruh bangunan | 15 |
| 3 | Swasta/ pedagang | 52 |
| 5 | Guru | 2 |
| 6 | Karyawan | 11 |
| 7 | Pensiunan | 1 |
| 8 | Blm bekerja / sebagai ibu rumah tangga | 215 |
| Jumlah | | 358 |

Sementara itu, karakteristik masyarakat berdasarkan pendidikan ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ada di Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

| No | Pendidikan terakhir | Jumlah (jiwa) |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Tamat SD | 41 |
| 2 | Tamat SMP | 28 |
| 3 | Tamat SMA | 39 |
| 4 | Akademi / perguruan tinggi | 2 |
| 5 | Pelajar dan yang belum sekolah | 59 |
| Jumlah | | 169 |

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa masyarakat yang ada di wilayah bantaran sungai memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang telah menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Hal ini seharusnya menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah cukup memadai untuk dapat mandiri meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat.

Namun, rata-rata pendapatan yang didapat masyarakat bantaran sungai Kapuas di Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur, sebagai buruh harian dan buruh bangunan sangat minim dan hanya berkisar sebanyak Rp.50.000 hingga 70.000 perhari, sedangkan pada hari sabtu dan minggu mereka tidak bekerja. Bila di hitung perminggu mencapai 250.000 hingga 350.000 perminggunya. upah ini hampir mencapai UMP (Upah Minimum Provinsi)

Kalimantan Barat yang sebesar Rp.1060.000 / bulan. Jumlah tersebut tidak mampu menopang kebutuhan keluarga, seperti biaya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga kita dapat melihat pada tabel 4.2, masyarakat yang lulus setingkat akademi dan perguruan tinggi hanya segelintir orang.

4.1.2 Identifikasi Penyebab Kemiskinan

4.1.2.1 Masalah Struktural Pendidikan

Masyarakat Bantaran Sungai Kapuas Kelurahan Tambelan sempit tidak banyak mengenyam pendidikan hingga kejenjang setara akademi maupun perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena kemampuan orangtua secara ekonomis tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat tinggi. Kualitas pendidikan yang baik tentunya akan di barengi dengan biaya pendidikan yang lumayan tinggi, khususnya untuk sekolah tingkat menengah atas yang tidak dijadikan pendidikan wajib oleh pemerintah. Tuntutan biaya pendidikan yang melampau tinggi khususnya yang ada diperkotaan tidak mampu di penuhi oleh keluarga atau golongan-golongan masyarakat kelas sosial bawah. Sementara itu, saat ini banyak menjamur sekolah-sekolah swasta dengan harga dan kualitas yang kadang-kadang jauh di atas sekolah negeri yang ada dan hanya dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan yang tinggi ini

mengakibatkan pendidikan menjadi prioritas kedua dan tidak ditempatkan dalam kebutuhan primer bagi golongan kelas sosial bawah. Dengan demikian mereka akan dengan sendirinya tersingkir dalam dunia pendidikan.

Ketidak mampuan masyarakat secara ekonomi juga mendorong para remaja lebih memilih menjadi pekerja dini demi membantu keluarga mereka. Selain itu, kondisi pendidikan yang minim ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa lingkungan (kultur) turut memberikan sumbangan yang besar dalam masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Masyarakat bantaran sungai tidak terbiasa dengan lingkungan akademis ternyata mempengaruhi kelangsungan remaja mereka dalam menentukan pendidikannya.

Hambatan struktural dimulai dari alasan-alasan personal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang paling mempunyai pengaruh signifikan dalam kehidupannya, salah satunya adalah pendidikan. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat berpotensi beresiko terhadap upaya pemenuhan kebutuhan. Pandangan masyarakat bantaran sungai masih terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka kurang menyadari bahwa saat ini mereka hidup dalam persaingan yang sangat ketat khususnya di wilayah perkotaan. *Frame* yang

melingkupi mereka pada dasarnya bersumber dari kebiasaan-kebiasaan mereka dan kemudian dipertegas oleh beberapa aspek yang saling terkait seperti pengaruh lingkungan dan keterjangkauan ekonomi keluarga sehingga membentuk sebuah keterbatasan struktural.

Keterbatasan struktural ini kemudian berlanjut pada kompleksitas yang memosisikan masyarakat bantaran sungai kapuas dalam kerentanan akibat keterbatasan ini. Misalnya dapat digambarkan sebagai kondisi dimana masyarakat memilih untuk mengenyam pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, masuk dalam sekolah yang kurang memiliki kualitas yang mendukung. Keterbatasan kualitas pendidikan yang ada tidak mampu mempengaruhi kualitas asuh yang baik. Hal ini tentu berpengaruh langsung, baik terhadap kualitas intelektual, kualitas emosional bahkan kualitas spiritual masyarakat. Akibatnya setelah luluspun mereka tidak mempunyai cukup keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal bersaing dalam dunia pekerjaan.

Sementara itu, masyarakat kelas sosial menengah ke atas mempunyai akses yang lebih baik terhadap dunia pendidikan di kota Pontianak. Masyarakat kelas sosial menengah ke atas yang umumnya mampu menyentuh pendidikan yang baik,

dengan kualitas sekolah yang lebih baik menjadikan mereka yang masuk dalam kelas sosial menengah ke atas mempunyai posisi yang lebih menguntungkan di banding dengan masyarakat kelas sosial bawah. Mampunya masyarakat kelas sosial atas menyentuh pendidikan dengan kualitas yang baik tentunya akan menghasilkan *output* atau kualitas peserta didik yang mempunyai kualitas intelektual dan keterampilan kerja yang jauh lebih baik. Akibatnya posisi masyarakat yang tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik akan kalah bersaing dalam hal mendapatkan pekerjaan yang lebih terjamin.

Keterbatasan keterbatasan struktural yang diderita oleh masyarakat bantaran sungai kapuas ini tanpa di sadari terus berlanjut menjadi sebuah hambatan yang memosisikan mereka dalam sebuah posisi yang kurang menguntungkan dan cenderung menimbulkan kerentanan dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan.

Ketidakberdayaan pendidikan masyarakat kelas sosial bawah menyebabkan masyarakat tidak mampu bersaing dalam dunia pekerjaan yang notabeneanya tidak hanya banyak membutuhkan spesifikasi keterampilan tetapi juga kualifikasi akademik. Apalagi saat ini bahwa permintaan pasar dunia kerja lebih selektif dalam menjaring calon-calon tenaga kerja yang ada, sehingga calon pekerja

harus memiliki kualifikasi khusus yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bila hal itu tidak terpenuhi maka, dengan sendirinya seseorang akan tersingkir dalam pasar dunia kerja.

4.2.1.2 Kesempatan Kerja

Keterbatasan struktural pendidikan kemudian berpengaruh terhadap faktor lain yang sangat penting dalam upaya kelangsungan hidup masyarakat, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang diperoleh dengan latar belakang pendidikan yang tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat apalagi di daerah perkotaan. Keterampilan yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan menjadi modal utama dalam memperoleh kesempatan kerja ternyata tidak didapat oleh masyarakat ekonomi bawah. Hal ini kemudian diperparah dengan rendahnya kesempatan pelatihan dari pemerintah yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang seharusnya membutuhkan pelatihan keterampilan justru tidak terakses dikarenakan pendataan yang dilakukan pemerintah tidak melibatkan rukun tetangga setempat untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya pemberian pelatihan keterampilan tidak menjangkau sasaran masyarakat yang tepat. Program ini justru menjadi tidak tepat sasaran.

4.2.1.3 Kepemilikan Tanah dan Akses Permodalan

Kesempatan kerja yang rendah mempunyai nilai pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya pembentukan modal masyarakat dalam upaya peningkatan produktifitas kehidupan. Kompleksitas yang dihadapi masyarakat bantaran Sungai Kapuas terkait dengan upaya peningkatan iklim usaha dan berusaha dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan keluarga, karena factor permodalan menjadi sebuah bentuk keterbatasan struktural. Keterbatasan struktural ini kita gambarkan sebagai berikut : Masyarakat bantaran sungai Kapuas kota Pontianak dengan pendapatan yang sangat minim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak mampu menyisihkan sebagian besar pendapatan untuk investasi membangun usaha. Sementara itu, keterbatasan mereka mengakses berbagai sumber-sumber permodalan ada kaitannya dengan informasi-informasi dan jaringan yang sangat minim mereka dapatkan. Sehingga upaya membangun sebuah usaha masih memiliki kerentanan terhadap persaingan dengan sumber usaha yang lebih besar yang tentunya mempunyai jaringan pasar yang lebih luas dan kerentanan ini justru akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat bantaran sungai karena sekali mereka jatuh, mereka tidak dapat bangkit kembali

karena keterbatasan modal yang mereka miliki. Kerentanan ini mengakibatkan kecenderungan ketidakmampuan masyarakat bersaing dengan masyarakat yang memiliki akses modal usaha yang lebih besar dan dapat mengembangkan usaha yang dapat memberikan dan menjamin prospek yang lebih baik. Akibatnya, untuk tetap bertahan, masyarakat berupaya menjaga posisi mereka dalam posisi yang aman. Mekanisme pertahanan masyarakat akan tetap berlangsung seperti itu, dan secara tidak langsung membelenggu mereka dalam kondisi yang statis atau lamban terhadap perubahan.

4.2.1.4 Perbedaan Kesempatan antar Anggota Masyarakat

Perbedaan kesempatan yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak mengarah kepada perbedaan kesempatan dan aksesibilitas terhadap permodalan. Seperti yang telah di bahas sebelumnya bahwa, aksesibilitas terhadap permodalan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan produktivitas usaha masyarakat. akses masyarakat ekonomi rendah terhadap modal dipengaruhi oleh sistem bantuan modal, khususnya dari lembaga keuangan seperti perbankan. Perbedaan kesempatan ini digambarkan sebagai berikut : sitem pemberian bantuan modal yang berasal dari lembaga keuangan seperti perbankan mempunyai persyaratan-persyaratan khusus yang

harus dimiliki oleh masyarakat. seperti pengembalian modal yang dilihat dari berpotensi atau tidaknya si peminjam modal mengembalikan pinjamannya terutama untuk pinjaman dalam jumlah yang besar. Jika pihak perbankan melihat tidak adanya potensi yang dijadikan sebagai jaminan pengembalian modal dalam jangka waktu sekian, maka pinjaman modal akan sulit di dapat.

Hal ini lah yang menggambarkan bagaimana sistem lembaga keuangan ini menimbulkan jurang baru distribusi pendapatan. Masyarakat ekonomi rendah seperti masyarakat di bantaran sungai Kapuas kota Pontianak memiliki aksesibilitas dan kecenderungan mendapatkan modal yang jauh lebih rendah dari masyarakat ekonomi ke atas. Hal ini dikarenakan perbankan cenderung melihat bahwa masyarakat ekonomi ke atas memiliki kecenderungan dan potensi yang jauh lebih baik terhadap upaya pengembalian modal.

4.2.1.5 Adanya Perbedaan Ekonomi Tradisional Vs Ekonomi Modern

Sebagai buruh harian lepas dan buruh bangunan para kepala keluarga masyarakat bantaran sungai masih cenderung mengandalkan tenaga fisik untuk dapat memperoleh penghasilan. Sedangkan saat ini, kota Pontianak mengalami peningkatan pesat dibidang pembangunan yang menuntut kecepatan dan keefisienan biaya produksi. Hal ini yang mengakibatkan posisi

tawar menawar kaum buruh menjadi sangat lemah dan bergantung pada para pengusaha maupun kontraktor untuk dapat melanjutkan kehidupannya.

4.2.1.6 Perencanaan Pembangunan Dan Dampaknya Terhadap Penghidupan Masyarakat Miskin Kebijakan-

kebijakan pemerintah kota Pontianak yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah kota Pontianak (RPJM) merupakan prioritas pembangunan masyarakat kota Pontianak yang akan dilakukan secara berkesinambungan hingga tahun 2014. Program-program pembangunan ini direncanakan untuk menjawab beberapa tujuan pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan sedapat mungkin dapat menampung kebutuhan masyarakat, dan menerapkan model pembangunan *Buttom Up*.

Strategi pembangunan yang diterapkan sebisa mungkin dapat bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ditempuh melalui upaya peningkatan di sektor perekonomian. Upaya peningkatan kesejahteraan melalui upaya peningkatan sektor perekonomian ini jelas memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Upaya peningkatan sektor perekonomian kota Pontianak tergambar dalam beberapa

kebijakan yang mengarah ke arah sana. Seperti memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja, memberikan modal bergulir untuk industri kecil dan menengah, memberikan kemudahan izin berusaha, meningkatkan iklim investasi yang kondusif, merevitalisasi koperasi sebagai soko ekonomi masyarakat, meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM pariwisata serta kualitas produk dan memberikan akses permodalan pada organisasi kepemudaan.

Sedangkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti meningkatkan pelayanan pendidikan melalui pewujudan sekolah standar nasional maupun internasional, mengoptimalkan pelatihan keterampilan masyarakat, hingga memberikan kesempatan bagi wanita untuk masuk dalam dunia politik.

Secara umum kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat dan kota Pontianak. Seperti meningkatkan iklim investasi yang kondusif di bidang perekonomian jelas membawa dampak yang baik bagi peningkatan perekonomian kota Pontianak. Investasi Swasta yang mencakup Dunia Usaha dan masyarakat adalah kegiatan ekonomi bisnis yang kegiatannya didasarkan atas potensi dan peluang usaha di daerah, mencakup seluruh investasi Badan usaha milik swasta dan Pemerintah (BUMN/D) khususnya

Swasta yang perijinannya menggunakan fasilitas PMDN serta non Fasilitas dan termasuk juga koperasi, usaha mikrokecil dan menengah. Pada tahun 2011 investasi dari swasta sebesar Rp.2.666,62 Milyar. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi Rp.3.086,48 Milyar pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 berkisar antara Rp.3.402,49 s/d 3.664,22 Milyar. Berkaitan dengan hal tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan angkatan kerja di kota Pontianak, untuk tingkat pengangguran, pada tahun 2011 adalah sebesar 7,26%.

Tingkat pengangguran diperkirakan turun menjadi 6,37% pada tahun 2012, dan untuk tahun 2013 diperkirakan turun kembali dengan kisaran antara 5,36% s/d 4,33% (Bappeda Kota Pontianak).

Karena apabila investasi berfungsi dengan baik, lembaga dan pasar keuangan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengambil keuntungan dari kesempatan investasi terbaik, karena dana mereka akan disalurkan terhadap penggunaan-penggunaan produktif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan, meningkatkan distribusi pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan. Tanpa adanya sistem keuangan yang bersifat inklusif dan menyeluruh, masyarakat miskin dan perusahaan-perusahaan yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mengandalkan sumber dananya sendiri yang terbatas.

Namun, kebijakan mengenai investasi dengan memberikan kemudahan izin

berusaha sedikit banyak tentu akan menimbulkan fungsi yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, peningkatan iklim investasi dengan memberikan kemudahan izin berusaha kepada setiap masyarakat akan dengan mudah dimanfaatkan masyarakat yang mempunyai modal yang besar serta akses keterampilan yang memadai untuk mengambil keuntungan dari kebijakan ini. Sementara itu, masyarakat yang mempunyai keterbatasan modal dan pengetahuan yang memadai akan kalah bersaing dan tentu dengan sendirinya akan tersingkir dari persaingan. Akibatnya masyarakat golongan bawah yang tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan adanya kebijakan ini hanya menjadi sasaran masyarakat kelas atas.

Di sisi lain, peluang yang terbuka untuk dapat meningkatkan investasi di kota Pontianak justru menyebabkan meningkatnya tingkat konsumtifitas masyarakat kota Pontianak. Akibatnya tingkat inflasi akan semakin meningkat dan menyebabkan harga barang-barang kebutuhan akan naik. inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya meningkatnya konsumsi masyarakat. Peluang terbukanya investasi di Pontianak akan cenderung memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, akibatnya permintaan yang semakin tinggi terhadap barang-barang konsumtif, maka hal ini akan menyebabkan harga-harga

cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini tentu akan berpengaruh signifikan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas sosial bawah. Investasi akan lebih mudah di manfaatkan oleh golongan kelas atas yang memiliki modal yang cukup. Sedangkan masyarakat bawah hanya menjadi objek tujuan yang bersifat konsumtif. Upaya ini justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat dan menjadikan ketimpangan distribusi pendapatan antar masyarakat. Masalah yang muncul dan tidak diharapkan ini disebut sebagai kontradiksi struktural dalam hal ini adalah kontradiksi struktural kebijakan. Boudon dan Elster (dalam Gidden, 2003) cenderung mengkaitkan kontradiksi konsekuensi aksi nyata yang tidak dikehendaki dan kontradiksi struktural juga potensial terhadap terjadinya konflik sosial. Dengan Kontradiksi struktural kebijakan ini muncul sebagai akibat kurangnya mengantisipasi dampak sosial jangka panjang yang akan muncul. Satu kebijakan mungkin akan menimbulkan dua fungsi yang berbeda dalam satu waktu yang sama dan akan berdampak berbeda mungkin dalam dua kelas sosial yang berbeda.

Kondisi semacam ini apabila di biarkan secara terus menerus akan menjadikan kungkungan struktural bagi masyarakat kelas sosial bawah, akibatnya upaya peningkatan kesejahteraan akan menjadi terhambat. Kungkungan struktural yang ada tanpa

disadari berdampak pada terciptanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Seperti yang diungkapkan Bahrun (2011) bahwa Kemiskinan struktural merupakan bagian eksternal dari si miskin yang berkaitan kegagalan sistem politik, institusi pemerintah, struktur elit dan birokrasi kekuasaan, serta berbagai kegagalan kebijakan yang "pro-rakyat" (*people-oriented development*).

Disatu sisi Pemerintah berusaha memerangi kemiskinan (*the poverty alleviation*) karena faktor struktural, kultural dan natural, tetapi kemudian terjebak dalam perangkap kemiskinan itu sendiri (*the poverty traps*). Dalam arti ketika Pemerintah berusaha menjawab pertanyaan kemiskinan ekonomi dan persoalan keterbelakangan sosial, ternyata di dalam jawaban masih banyak menyisakan pertanyaan. Bagi kaum *developmentalis* hal inilah yang dikenal dengan istilah *antagonistic developmentalism*.

Kebijakan investasi akan banyak mendorong para investor yang mempunyai cukup modal masuk ke Kota Pontianak dan memulai membuka usaha barunya. Sedangkan masyarakat kelas bawah tidak mampu mempunyai akses terhadap pembentukan modal. Akibatnya masyarakat tidak mempunyai posisi tawar menawar yang cukup dalam persaingan usaha dengan para investor atau golongan kelas sosial menengah atas. Masyarakat juga enggan melakukan pinjaman modal kepada bank, dikarenakan umumnya mereka tidak mempunyai jaminan yang cukup untuk mengajukan

modal. Seperti yang diungkapkan ibu Munirah selaku ketua Rukun Tetangga Rt.01/Rw.01 berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“warga sini kebanyakan ndak mau pinjam modal ke bank karena kalo mau pinjam ke bank kan harus punya jaminan, nah ape yang nak jadi jaminan, ada pun tak cukup untuk jadi jaminan”

Jaminan merupakan alasan yang digunakan masyarakat bantaran sungai kapuas untuk tidak mencoba mengajukan pinjaman modal untuk usaha ke lembaga keuangan seperti bank. Akibatnya banyak masyarakat yang hanya bergantung pada para pengusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Karena pendidikan yang rendah dan keterampilan yang minim, posisi tawar menawar dalam pekerjaan juga menjadi sangat rendah. Akibatnya mereka terutama masyarakat di bantaran sungai menjadi pekerja kasar seperti buruh harian lepas tanpa tunjangan.

Selain itu, rencana pemerintah untuk membangun tepian sungai sebagai objek wisata dengan membangun *barau* yang sama dengan alun-alun Kapuas yang sudah ada di tepian sungai di masa mendatang kemungkinan akan menimbulkan kerentanan baru terhadap kehidupan kehidupan masyarakat bantaran sungai terkait dengan perubahan dalam lingkungan mereka. Akibatnya masyarakat yang mengandalkan sungai kapuas sebagai sumber kehidupan tambahan seperti tambak, sampan kayuh, akan kehilangan pekerjaan mereka

apabila kebijakan tersebut tidak disertai dengan perencanaan yang lebih terintegrasi dan memperhatikan kemungkinan alternatif bagi masyarakat bantaran sungai kapuas.

Selain itu, wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, akan menambah deret panjang penderitaan masyarakat kelas sosial menengah ke bawah. Pasalnya, dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak akan secara otomatis menaikkan biaya produksi berbagai perusahaan serta industri yang ada, akibatnya, untuk menekan harga produksi yang tinggi harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat dengan sendirinya. Akibatnya hal tersebut tentu akan memberatkan masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat terkait dengan naiknya harga-harga bahan bakar minyak dengan memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) ternyata gagal menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat. hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang ada tidak memperhatikan perencanaan yang lebih terintegrasi. Pemberian bantuan langsung tunai justru akan meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Seperti, program bedah rumah untuk perbaikan kawasan permukiman yang hanya berupaya memperbaiki kondisi luar tanpa perencanaan yang lebih terintegrasi jangka panjang.

Sementara itu, kenaikan harga bahan bakar

minyak juga akan berpengaruh signifikan terhadap pekerja-pekerja buruh yang ada. Tingginya barang-barang kebutuhan yang ada, tanpa terkecuali bahan baku property. Untuk menekan biaya produksi yang semakin tinggi, pengusaha akan menekan biaya pekerja dengan mengurangi jatah pekerja yang ada. Akibatnya kesempatan kerja buruh akan semakin menurun.

4.2 Kemiskinan dalam Kajian Konsep Struktural

Berbagai bentuk indikasi kemiskinan dan identifikasi faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di bantaran sungai Kapuas Kota Pontianak yang ditemukan dalam penelitian menggambarkan betapa fenomena kemiskinan atau tingkat kurangnya kesejahteraan masyarakat tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah atau wilayah yang minim fasilitas umum serta memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap sarana dan prasarana seperti pedesaan. Tetapi indikasi kemiskinan yang muncul juga diderita oleh beberapa golongan masyarakat yang hidup ditengah-tengah ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

Meskipun beberapa penyebab kultural seperti pola hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap kehidupan yang berdampak pada prioritas dan otoritas pilihan hidup masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan besarnya pengaruh struktural dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat terhimpit bahkan terkurung dalam suatu perangkat kemiskinan yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu hasil akhir dari penelitian ini adalah pembahasan yang merupakan bentuk akumulasi dari hasil penelitian dan alur konsep-konsep teori struktural. Pada bagian ini, penting diketahui bahwa kolaborasi antara konsep-konsep

teori struktural menjadi bagian penting dalam melihat berbagai fenomena yang di dapat melalui hasil penelitian.

Fenomena kemiskinan merupakan bentuk akumulasi dari berbagai penyebab yang saling terkait satu sama lain. Besarnya pengaruh struktural terhadap kehidupan masyarakat bantaran sungai Kapuas tidak terlepas dari beberapa faktor kultural yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di bantaran sungai Kapuas. Misalnya, masih adanya intervensi-intervensi budaya masyarakat bantaran sungai Kapuas yang memandang bahwa pendidikan dipengaruhi oleh besar atau tidaknya partisipasi pendidikan dalam lingkungan hidup mereka yang kemudian kultur tersebut menjadi suatu *habit* yang melingkupi masyarakat. Budaya yang mempunyai korelasi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai budaya kemiskinan.

Budaya kemiskinan ini ternyata memberikan sumbangan besar terhadap upaya untuk melihat penyebab-penyebab lain secara struktural yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah. Misalnya besarnya pandangan masyarakat terhadap pendidikan ternyata juga mempengaruhi sikap pemerintah terhadap program-program yang besentuhan terhadap pendidikan, atau bahkan sebaliknya sikap pemerintah yang tergambar dari beberapa kebijakan mengenai pendidikan seperti mahalnya biaya pendidikan dan lain sebagainya tersebut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap prioritas pendidikan di kalangan masyarakat yang mempunyai kondisi ekonomi yang rendah.

Keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena lain menyebabkan berlakunya sistem dualitas struktural dalam fenomena kehidupan masyarakat bantaran sungai Kapuas. Dualitas struktur merupakan keterkaitan antara agen

dan struktur dalam fenomena sosial tertentu.

Sumbangan besar yang diberikan oleh kemiskinan kultural yang muncul pada bagian awal pembahasan ini kemudian berlanjut terhadap besarnya pengaruh struktural yang melingkupi masyarakat di bantaran sungai Kapuas Kota Pontianak. Oleh karena itu, pada dasarnya bentuk kemiskinan struktural yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berupaya melihat betapa pengaruh-pengaruh struktural dalam lingkungan sosial masyarakat membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Konsep-konsep struktural dalam skala makro seperti ketimpangan distribusi kekuasaan, peraturan-peraturan yang justru tanpa disadari menimbulkan dampak terhadap masyarakat bahkan stratifikasi ekonomi yang menyebabkan perbedaan kelas dalam masyarakat.

Stratifikasi ekonomi yang disebabkan oleh adanya distribusi pendapatan yang tidak merata terjadi pada masyarakat bantaran sungai Kapuas dikarenakan ketimpangan kesempatan yang diperoleh masyarakat, sebagai contoh, rendahnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh jenis keterampilan yang di miliki masyarakat dan hal ini diperparah dengan aksesibilitas terhadap pelatihan dan pendidikan. Hal ini justru mengakibatkan masyarakat kurang memiliki posisi yang baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

Selain itu, inti dari permasalahan struktural yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kondisi ekonomi masyarakat di Bantaran sungai Kapuas Kota Pontianak adalah perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan ini muncul dari berbagai pengaruh sistem sosial yang ada. Salah satunya adalah pengaruh kerentanan dan ketidakberdayaan masyarakat. Ketidakberdayaan yang terjadi pada masyarakat bantaran sungai Kapuas seperti rendahnya keterampilan kerja, rendahnya

aksesibilitas terhadap permodalan, juga pendidikan yang rendah menyebabkan kerentanan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. misalnya kerentanan terhadap kekhawatiran akan mencoba hal-hal baru sehingga muncul ketergantungan terhadap jenis pekerjaan yang dominan di lakukan oleh masyarakat. Selain itu kerentanan dalam dunia usaha terhadap resiko kebangkrutan yang justru akan berdampak pada mobilitas keuangan keluarga. Dan juga kerentanan terhadap objek sasaran masyarakat kondisi ekonomi yang lebih baik untuk memanfaatkan situasi ini. Karena pada dasarnya stasisitas yang dialami mematikan produktivitas masyarakat, sehingga justru rentan terhadap sasaran konsumtif.

Peluang untuk meningkatkan nilai investasi dengan memberikan kemudahan izin berusaha yang di keluarkan pemerintah, merupakan salah satu contoh yang akan berdampak pada kerentanan dan ketidakberdayaan yang akan semakin dirasakan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah.

Para pakar strukturalis yang menyebutkan bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul dari adanya korelasi struktur yang timpang, timbul dari tidak adanya hubungan yang simetris dan sebangun yang menempatkan manusia sebagai obyek. Kemiskinan struktural timbul karena adanya hegemoni karena adanya kebijakan negara dan pemerintah atau orang-orang yang berkuasa, sehingga orang yang termarginalkan semakin termarginalkan (Ridwan, 2011), akan terlihat bahwa apa yang disebut pakar strukturalis terhadap perangkap kemiskinan (*poverty trap*) akan semakin jelas terlihat apabila kita melihat bahwa fenomena masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah di beberapa wilayah di kota Pontianak, salah satunya adalah masyarakat di permukiman bantaran sungai Kapuas, satu contoh ketimpangan struktur yang akan menyebabkan orang-orang dengan

kondisi tingkat kesejahteraan yang rendah akan semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan dan kerentanan yang disebabkan karena hegemoni atau kekuasaan pemerintah yang justru menimbulkan jurang dan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakatnya.

Dari contoh ini juga dapat dilihat betapa pandangan kaum *developmentalis* yang menyebutkan bahwa *poverty trap* atau perangkap kemiskinan muncul dimana disatu sisi pemerintah berupaya mencoba menyelesaikan permasalahan kemiskinan tetapi justru banyak menyisakan pertanyaan, attau muncul berbagai fungsi laten yang tidak diharapkan.

Kerentanan dan ketidakberdayaan yang dialami masyarakat bantaran sungai Kapuas kota Pontianak menjadi hambatan yang kompleks dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, perlu adanya perubahan mendasar dalam struktur-struktur sosial, seperti perbaikan kesempatan pendidikan dan perubahan mendasar terhadap bentuk-bentuk hegemoni pemerintah yang lebih prorakyat dan lebih terintegrasi. Dengan demikian, kemiskinan struktural akan dapat diperbaiki secara perlahan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kemiskinan masyarakat yang ada di Pinggiran sungai Kapuas merupakan indikasi yang lahir karena adanya penyebab dari aspek-aspek yang terkait antara penyebab kultural seperti .motivasi individu masyarakat, kebiasaan-kebiasaan anggota masyarakat di lingkungan yang mempengaruhi tindakan atau prilaku masyarakat lainnya terhadap upaya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat

1. Kondisi tekanan struktural yang dialami masyarakat bantaran sungai Kapuas kota Pontianak dapat digambarkan sebagai sebuah kehidupan yang sarat akan keterbatasan

pendidikan, minimnya keterampilan kerja, rendahnya aksestabilitas masyarakat terhadap sarana perkotaan seperti fasilitas keuangan serta ketidakmampuan masyarakat menyesuaikan permintaan pasar tenaga kerja.

2. Keterbatasan struktural yang dimiliki oleh masyarakat di bantaran sungai Kapuas kota Pontianak, berpengaruh signifikan terhadap upaya mereka untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga mereka. Keterbatasan ini saling terkait satu sama lain sehingga membentuk sebuah hambatan struktural yang harus diderita oleh masyarakat, yang digambarkan sebagai berikut; Keterbatasan mengenai keterbatasan pendidikan, yang tergambar dalam rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikarenakan keterbatasan biaya ekonomi keluarga dan juga beberapa pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter pandangan terhadap dunia pendidikan serta beberapa alasan yang berkaitan dengan kebutuhan dan pilihan yang mendasari keputusan untuk tidak masuk dalam dunia pendidikan yang lebih tinggi yang. Sementara itu rendahnya tingkat pendidikan memperngaruhi munculnya keterbatasan baru yaitu keterbatasan kesempatan kerja dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat keterampilan masyarakat dilakukan masyarakat sehingga perubahan permintaan tenaga kerja dalam dunia kerja tidak mampu disesuaikan oleh masyarakat. selain itu. Sementara itu, upaya meningkatkan produktivitas juga terhalang oleh keterbatasan kepemilikan modal, yang dilatarbelakangi oleh rendahnya aksestabilitas

masyarakat terhadap sarana-sarana keuangan yang ada serta kemampuan untuk mengaksesnya. Masyarakat bantaran sungai Kapuas tidak mempunyai kecukupan financial berupa modal untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan memperoleh tambahan penghasilan yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan munculnya beberapa kebijakan kota yang secara tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan yang dialami masyarakat di bantaran sungai kapuas kota Pontianak, seperti upaya pemerintah meningkatkan iklim investasi dan kemudahan izin berusaha secara tidak langsung akan menumbuhkan iklim persaingan antar masyarakat. masyarakat kelas social menengah kebawah yang notabenehnya mempunyai keterbatasan dalam modal secara tidak langsung akan menjadi sasaran konsumtif kelompok masyarakat kelas atas yang mempunyai akses jauh lebih baik dalam hal itu. Sehingga masyarakat tidak mempunyai posisi tawar menawar yang lebih baik dalam dunia usaha.

3. Program-program yang ada dalam upaya pembangunan masyarakat di kota Pontianak ini sudah cukup baik, namun belum menyentuh skala perencanaan yang lebih terintegrasi. Perbedaan pandangan antara pemangku kepentingan penyelenggara pembangunan dan masyarakat menjadikan tujuan pembangunan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2003). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Henslin, M, J.(2006). *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Jakarta : Erlangga
- Kian W, T. (1981). *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Menno & Mustamin A. (1992). *Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Rajawali
- Narwoko, D & Bagoeng, S. (2006). *Sosiologi, teks pengantar dan terapan*. Jakarta : Prenada media
- Nasir, A. (2006). *Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam : teori dan aplikasi di kepulauan borneo*. Malaysia : Picaro enterprice
- Salim, E. (1984). *Perencanaan Pembangunan Dan Pemerataan Pembangunan*. Jakarta : Idayu
- Satori, D. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Soejatmoko. (1989). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan..* Jakarta : LPES
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Suparlan, P. (1984). *Kemiskinan di perkotaan; bacaan untuk antropologi perkotaan*. Jakarta : Sinar Harapan
- Todaro, M & Stephen C. S. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Jakarta : Erlangga
- Adil, D, M. (2012). *Kemiskinan Nelayan Di Kecamatan*

- Mariso Kota Makasar*, diambil dari <file:///C:/Users/user/Downloads/kemiskinan-nelayan-lette-kec-mariso.html> pada 13 Desember 2012 pukul 14.05 wib
- Aris dan Arif M. (2009), diambil dari <http://acch.kpk.go.id/documents/10157/27926/Aspek+Sosial+Korupsi++Aris+Arif+Mundayat+%28print%29.pdf> pada 13 Desember 2012 pukul 13.30 wib
- Bahrum, S. (2011). *Kemiskinan Struktural dari Perspektif Teoritis*, diambil dari <http://www.haluankepri.com/opini-/21992-kemiskinan-struktural-dari-perspektif-teoritis.html> pada 13 Desember 2012 pukul 13.40 wib
- Ridwan, (2011). *Tinjauan Sosiologi Terhadap Novel "Laskar Pelangi" Karya Andrea Hirata*, diambil dari http://readone.guru-indonesia.net/artikel_detail-16813.html pada 13 Desember 2012 pukul 14.15wib).
- Soedarso. (2009). Diambil dari [http://journal.unair.ac.id/files/PDF/Tekanan %20Kemiskinan %20Struktural.pdf](http://journal.unair.ac.id/files/PDF/Tekanan%20Kemiskinan%20Struktural.pdf) pada 13 Desember 2012 pukul 13.45 wib).
- Kecamatan Pontianak Timur dalam angka*, Katalog [Badan](#) Pusat Statistik Kota Pontianak 2012
- Monografi Kelurahan Tambelan Sampit Juli – Desember 2012*
- Draft RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Perubahan 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Pontianak

